KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : SPMB 2026 Diikuti 9,4 Juta Anak
Tanggal : Jumat, 08 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

SPMB 2026 Diikuti 9,4 Juta Anak

Kemendikdasmen meminta pemerintah daerah segera memastikan daya tampung sekolah agar 9,4 juta siswa SD hingga SMA bisa tertampung dalam SPMB 2026/2027.

JAKARTA, KOMPAS — Sistem penerimaan murid baru mulai disiapkan menjelang tahun ajaran baru 2026/2027. Pemerintah daerah perlu memastikan daya tampung sekolah sesuai dengan jumlah murid baru yang akan diterima. Ada 9,4 juta anak dari jenjang SD hingga SMA yang harus mendapatkan bangku sekolah pada tahun ini.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto menegaskan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di tingkat provinsi harus memverifikasi perhitungan daya tampung sekolah untuk menghindari masalah klasik dalam SPMB, seperti kurangnya ruang kelas atau ketersediaan guru.

Pemerintah daerah tidak boleh sembarangan menambah daya tampung. Setidaknya ada tiga indikator menghitung daya tampung, yakni sarana dan prasarana, ketersediaan guru, dan anggaran operasional sekolah harus sesuai dengan jumlah murid yang diterima.

"SPMB mewajibkan pemerintah pusat dan daerah memastikan semua anak yang ingin melanjutkan dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA atau SMK itu punya tempat. Maka, paradigmanya menjadi sistem, bukan seleksi," kata Gogot dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Sama seperti tahun lalu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang SPMB, jalur penerimaan masih terbagi dalam empat kategori, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Kuota SPMB SD terdiri dari jalur domisili minimal 70 persen, afirmasi minimal 15 persen, dan mutasi maksimal 5 persen. Kemudian, kuota SPMB SMP terbagi atas jalur domisili minimal 40 persen, afirmasi minimal 20 persen, prestasi minimal 25 persen, dan mutasi maksimal 5 persen.

Adapun kuota SPMB SMA terbagi atas jalur domisili minimal 30 persen, afirmasi minimal 30 persen, prestasi minimal 30 persen, dan mutasi maksimal 5 persen.

"Jadi, murid dari keluarga yang tidak mampu itu mendapat privilese di jalur afirmasi 30 persen. Dia kurang mampu dan dekat dengan sekolah, dia dapat privilese lagi dengan domisili. Dia tidak mampu dan berprestasi, dapat privilese lagi di jalur prestasi. Jadi, murid dari keluarga yang tidak mampu itu mempunyai 90 persen kesempatan untuk masuk di sekolah yang diinginkan," ucapnya.

Adapun jadwal pelaksanaan SPMB juga ditentukan pemerintah daerah. Kemendikdasmen menyarankan pengumuman pendaftaran SPMB minimal minggu pertama bulan Mei, dilanjutkan dengan rangkaian pendaftaran, seleksi, pengumuman penerimaan, hingga daftar ulang dilakukan pada Juni dan Juli dengan memperhatikan kalender pendidikan tahun ajaran baru 2026/2027.

Melibatkan swasta

Kemendikdasmen, lanjut Gogot, mendorong pemda untuk melibatkan sekolah swasta guna memperluas daya tampung melalui skema "SPMB Bersama". Hingga saat ini tercatat ada 148 daerah di 10 provinsi dan 138 kabupaten/kota yang telah memberikan bantuan operasional ataupun personal kepada sebanyak 8.579 anak dari keluarga kurang mampu agar dapat bersekolah di sekolah swasta secara gratis.

"Melalui SPMB Bersama ini, pemda bisa memberikan subsidi kepada peserta didik yang kurang mampu, yang tidak diterima di sekolah negeri, tetap belajar melanjutkan di sekolah swasta. Tentu bukan sekolah swasta yang mahal," ucap Gogot.

Salah satu daerah yang terus meningkatkan pelibatan sekolah swasta dalam SPMB Bersama adalah Pemerintah Provinsi Jakarta dari 40 sekolah pada tahun lalu menjadi 103 sekolah swasta tahun ini. Sekolah yang digandeng diprioritaskan pada kelurahan di lima wilayah kota administrasi yang tidak memiliki sekolah negeri.

"Program ini semakin memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi warga Jakarta," ujar Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan SPMB secara matang, transparan, dan berpihak pada hak anak untuk memperoleh pendidikan yang adil dan berkualitas. Semua pihak harus berupaya menekan angka anak tidak sekolah yang kini berkisar 3,5 juta-4 juta anak.

Pemerintah juga perlu memastikan adanya keseimbangan antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah swasta merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional yang selama ini turut membantu negara dalam memenuhi akses pendidikan.

"Jangan sampai ada penumpukan pendaftaran di satu sekolah, sementara sekolah lainnya kekurangan murid. Karena itu, kebijakan penerimaan murid harus memperhatikan aspek pemerataan dan keberlangsungan seluruh satuan pendidikan," kata Kurniasih.

Sistem domisili (yang dahulu zonasi) juga perlu terus dikaji lebih mendalam agar benar-benar menghadirkan keadilan pendidikan, baik bagi siswa, orangtua, maupun satuan pendidikan di daerah-daerah. Ini penting untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, bukan hanya pemerataan akses.

Pada tahun ini, SPMB jalur prestasi jenjang SMP dan SMA akan mempertimbangkan hasil tes kemampuan akademik (TKA) tiap-tiap murid, selain menggunakan nilai rapor atau piagam prestasi nonakademik. Murid dengan nilai TKA yang tinggi dapat memperoleh keuntungan lebih untuk masuk ke sekolah negeri.

(TIO)